

**PENGARUH KOMPETENSI, KOMITMEN ORGANISASI,
KUALITAS REVIEW DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada BPKP Jawa Tengah)**

Dicky Zhafar Riyanto

Program Studi Akuntansi, Universitas AKI

Abstrak

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, kualitas review dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor di Inspektorat Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, jumlah sampel yang di peroleh dengan teknik pengambilan sampel convenien sampling adalah sebanyak 61 responden. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dengan menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas review berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara bersama-sama kompetensi, komitmen organisasi, kualitas review, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel kompetensi, komitmen organisasi, kualitas review dan sistem pengendalian intern dapat menjelaskan kualitas laporan keuangan yang diambil auditor pemerintah sebesar 82,30 %.

Kata Kunci : Kompetensi, Komitmen Organisasi, Kualitas Review, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Corresponding author : **Dicky Zhafar Riyanto**

Email address : 122180053@unaki.ac.id

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan daerah antara lain pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah (Amirullah et al, 2010).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berbeda dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan, perbedaannya terletak pada penempatan posisinya, yaitu kalau standar akuntansi pemerintahan lebih kepada dasar aturan keuangan daerah yang mengatur daerah itu semestinya, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah lebih kepada seperangkat prosedur yang mengatur segala proses dan kegiatan yang ada pada pencatatan keuangan daerah (Sanjaya, 2017).

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia telah di atur dalam perundang-undangan melalui peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun pengertian standar akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dapat terwujud apabila di dukung oleh kompetensi SDM, komitmen organisasi, sistem pengendalian intern dan kualitas review yang baik (Maulana, dkk, 2017).

Kompetensi staf akuntansi juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Menurut Cris Kuntadi, 2009 kompetensi umum yang perlu dimiliki oleh pelaksana review adalah pemahaman mengenai akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik/pemerintahan termasuk pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemahaman mengenai sistem pengendalian intern. Karena pelaksanaan review berbeda dengan audit. SPKN yang diterbitkan BPK menjadi standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. SPKN dimaksudkan untuk menjadi patokan bagi para auditor dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara agar dapat memelihara kompetensi, integritas, obyektivitas dan independensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan yang dilaksanakannya. Semakin kompeten staf akuntansi pegawai negeri sipil, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Yunita, 2017).

Pengendalian Internal dilakukan untuk melindungi kekayaan organisasi dengan cara meminimalisasi penyimpangan dan pemborosan serta memaksimalkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi/Instansi Pemerintah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah disingkat SPIP merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakbasahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Yunita, 2017).

Riset gap pengaruh variabel kompetensi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penelitian Amirrullah et al (2010), Hari Raditya Nugroho (2016), Yunita (2017), Maulana, dkk (2017), membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil ini berbeda dengan penelitian T. Asri Yunita (2015), Kusuma dan Darmansyah (2017), Aditya Sanjaya (2017), yang memberikan hasil kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Maulana et al (2017), yang meneliti tentang pengaruh kompetensi, komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas LKPD. Yang berbeda dengan penelitian sekarang adalah 1) pengujian pengaruh kompetensi, komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak dilakukan oleh Maulana et al (2017). 2) Lokasi penelitian di BPKP Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berbeda dan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah kualitas review berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

LITERATUR

Stewardship Theory

Grandtheory yang mendasari penelitian ini adalah *Stewardship theory*, yaitu teori yang menggambarkan situasi di mana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). *Stewardship theory* beranggapan bahwa kepentingan rakyat dapat dimaksimalkan dengan membagi (*shared*) wewenang, hak dan kewajiban di antara peranan pengawas/pemeriksa

dan manajemen, sehingga dalam *Stewardship theory* menyatakan bahwa para eksekutif cenderung akan semakin termotivasi untuk bertindak dalam kepentingan korporasi dibandingkan dengan kepentingan mereka sendiri (Hunger dan Wheelen, 2004).

Hubungan *Stewardship theory* dengan kualitas laporan keuangan daerah adalah eksekutif sebagai *steward* akan bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempertanggung jawabkan pengelolaan kekayaan negara. Guna mewujudkannya pihak eksekutif berusaha untuk membuat laporan keuangan daerah yang berkualitas, untuk mewujudkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan kompetensi aparatur pemerintah daerah yang berkualitas, komitmen organisasi yang baik, kualitas review dan pengendalian intern.

Kompetensi

Standar umum pertama (SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*). Sedangkan Trotter (1986) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompoten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Sri Lastanti (2005) mendefinisikan kompetensi adalah ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Selanjutnya Sri lastanti (2005) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan review yaitu pengetahuan dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan. Kisnawati (2012), menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Ashton (1991) dalam (Riduwan dan Surya, 2013), menunjukkan bahwa dalam literatur psikologi, pengetahuan spesifik dan lama pengalaman bekerja sebagai faktor penting untuk meningkatkan kompetensi. Ashton juga menjelaskan bahwa ukuran kompetensi tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain dalam pembuatan keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki sejumlah unsur lain di selain pengalaman. Krisnawati (2012) menunjukkan bahwa komponen kompetensi untuk auditor di Indonesia terdiri atas:

1. Komponen pengetahuan, yang merupakan komponen penting dalam suatu kompetensi. Komponen ini meliputi pengetahuan terhadap fakta-fakta, prosedur-prosedur dan pengalaman. Pengalaman akan memberikan hasil dalam menghimpun dan memberikan kemajuan bagi pengetahuan.
2. Ciri-ciri psikologi, seperti kemampuan berkomunikasi, kreativitas, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, juga menunjukkan bahwa kepercayaan, komunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama adalah unsur penting bagi kompetensi audit

Komitmen Organisasi

Komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipertanyakan kepada seorang Kalbers dan Fogarty (1995). Komitmen sama sekali tidak ada hubungannya dengan bakat, kepintaran atau talenta. Dengan komitmen yang kuat memungkinkan

seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental dan spiritual tambahan yang dapat diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana.

Komitmen organisasi menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi (Mowday, et al. 2007). Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Komitmen organisasional terbangun kalau seseorang mengembangkan 3 sikap terhadap organisasi di mana ia bekerja (Tranggono dan Kartika, 2008):

1. Perasaan identifikasi dengan tujuan organisasi.
2. Rasa keterlibatan dengan pekerjaan yang mendorong seseorang mampu membenamkan diri dalam pekerjaannya dan bekerja baginya sebagai kenikmatan psikologis.
3. Rasa kesetiaan dan keterlibatan emosional dengan organisasi tempat ia bekerja.

Teori mengenai komitmen organisasional muncul dan berkembang pada tahun 1970-an, dan dipandang sebagai faktor kunci yang menentukan hubungan antara individu dan organisasi. Komitmen organisasional terdiri dari (Luthans, 2005):

1. Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota suatu organisasi.
2. Kemauan besar untuk berusaha bagi organisasional.
3. Kepercayaan yang kuat dan penerimaan terhadap nilai atau tujuan organisasi.

Komitmen organisasi memusatkan perhatian pada kesetiaan karyawan dan merupakan kondisi psikologis atau orientasi karyawan tersebut terhadap organisasi, dimana karyawan bersedia mengeluarkan energi ekstra demi kepentingan perusahaan, komitmen terhadap organisasi terbangun bila masing-masing individu mengembangkan 3 sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi, yaitu :

1. Pemahaman/penghayatan dari tujuan perusahaan
2. Perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan
3. Perasaan loyal

Komitmen organisasional muncul dari berbagai aspek (Robbins, 2006).

1. Dipengaruhi oleh pekerjaan itu sendiri. Semakin tinggi tanggung jawab dan otonomi yang berkaitan dengan pekerjaan, semakin tinggi komitmen yang diperlihatkan seseorang semakin tinggi kesempatan untuk promosi, dan semakin besar ketegangan dan ambiguitas yang berhubungan dengan pekerjaan, semakin rendah tingkat komitmennya.
2. Komitmen organisasional dipengaruhi oleh keberadaan dari kesempatan tawaran kerja yang lain. Semakin besar kesempatan seseorang untuk menemukan pekerjaan di tempat lain dan semakin besar kesempatan keinginan itu, semakin rendah komitmen seseorang terhadap organisasi.
3. Komitmen organisasional juga dipengaruhi oleh karakter yang ada pada seseorang. Pegawai yang lebih tua atau masa kerjanya lama, dan yang puas dengan tingkat kinerjanya cenderung mempunyai tingkat komitmen yang tinggi pula.
4. Komitmen organisasional dipengaruhi beberapa faktor yang berkaitan dengan situasi kerja secara umum. Semakin puas pegawai dengan penyeliaanya atau dengan penilaian kinerja yang adil, maka seseorang semakin merasa bahwa organisasi memperhatikan kesejahteraan mereka dan semakin besar komitmen pada organisasi.

Berdasarkan teori akuntansi perilaku, komitmen organisasi merupakan perilaku auditor untuk berusaha bersikap dan berperilaku untuk mencintai dan merasa memiliki organisasi, sehingga bisa sebagai kekuatan atau dorongan bagi pegawai untuk berkorban kepada instansi agar

tujuan organisasi dapat tercapai. Semakin tinggi komitmen karyawan semakin besar kesediaan mereka untuk berkorban dan semakin baik kinerjanya. Seorang auditor pemerintah akan memberikan rasa mencintai pada pekerjaan, sehingga auditor dalam melakukan audit akan bersikap jujur dan memberikan yang terbaik bagi negara.

Kualitas Review

Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 menjelaskan review adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan (LK) agar LK tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keyakinan terbatas tersebut karena dalam review tidak dilakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber. Pada praktiknya, pelaksanaan kegiatan review seringkali memiliki persamaan dengan pelaksanaan kegiatan audit. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diberikan batasan-batasan yang membedakan antara kegiatan review dengan kegiatan audit.

Berikut merupakan beberapa pendapat mengenai pengertian review yaitu:

1. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Review adalah pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas LK agar LK tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. review tidak mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, pengujian atas catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti dan prosedur tertentu lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PBI/2006

Review adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas LK agar LK tersebut sesuai dengan SAP.

3. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Review yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terbatas atas LK dalam rangka pernyataan tanggung jawab (statement of responsibility) atas LK tersebut. Pernyataan tanggung jawab menyatakan bahwa LK telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP. review yang akan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 harus meliputi review atas SPI dan kesesuaian dengan SAP. Namun, SPI yang di review dibatasi pada pengendalian yang berkaitan dengan penyusunan LK.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan, dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas LK bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas LK agar LK tersebut disajikan berdasarkan SPI yang memadai dan

sesuai dengan SAP. Tujuan review atas LKPD untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP.

Pelaksanaan review dilakukan oleh tim secara paralel dengan penyusunan LKPD. Review tersebut dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan tersebut merupakan prosedur review yang harus dilakukan meliputi penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Sebelum ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan, dilakukan persiapan berupa pengumpulan informasi keuangan, LK yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim review yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.

Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mendefinisikan bahwa, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakbasahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD.

Manaf et al. (2014) yang menyebutkan bahwa pemahaman auditor terhadap sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap proses review LKPD. Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang terintegrasi yang dilaksanakan secara kontinyu dalam semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan aparat pemerintah, mulai pimpinan sampai dengan staf, dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Ikhsan, 2018). Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan yang memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (PP No. 71 tahun 2010). Relevan adalah apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan para pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Andal yaitu penyajian laporan keuangan disajikan dengan keadaan sebenarnya bebas dari kata menyesatkan bersifat netral. Dapat dibandingkan adalah dapat dibandingkan antar periode ataupun antar entitas. Kemudian dapat dipahami yaitu dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan penggunaan.

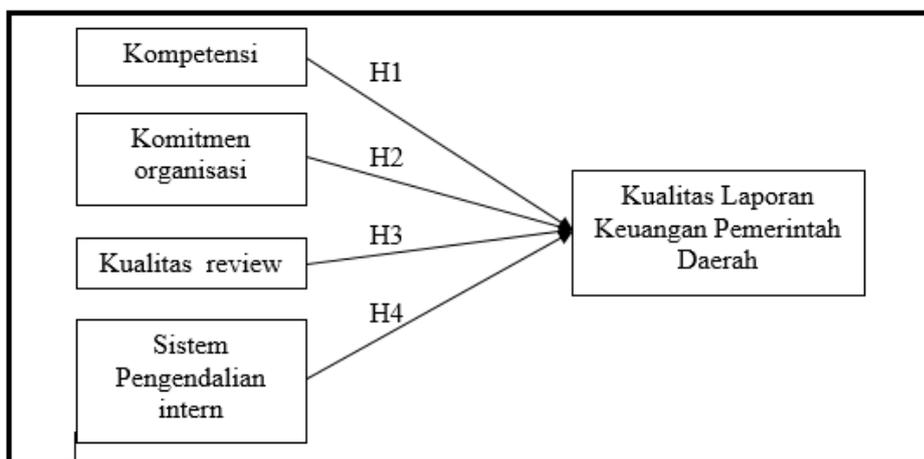
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan

posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan pelaporan keuangan adalah (Ikhsan, 2018) :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban dan pengelolaan (*accountability and stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional (*managerial and control*)

Kerangka Pikir Teoritis



Hipotesis

- H1 : Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- H2 : Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- H3 : Kualitas review berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- H4 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

METODOLOGI

Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel

Populasi menurut Indriantoro dan Supomo (2012) adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor di Inspektorat Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, yaitu 75 orang.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung kepada objek penelitian dengan mekanisme

kuesioner model tertutup yang memuat daftar pertanyaan yang terkelompok menurut dimensi-dimensi pengukuran variabel, sedangkan data sekunder yaitu data diperoleh dengan cara menghubungi pihak yang memiliki data tersebut.

Untuk memperoleh data primer, digunakan penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data melalui kuisisioner yang merupakan daftar pertanyaan tersruktur yang ditujukan pada responden. Sedangkan data sekunder telah tersedia sebelumnya, sehingga hanya perlu menghubungi pemilik datanya saja untuk memperolehnya.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Kuesioner. Kuesioner dilakukan dengan mengirim kuesioner di Inspektorat Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk dilakukan pengisian oleh auditor tentang pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, kualitas review, sistem pengendalian intern terhadap kualitas LKPD.

Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variable-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata, maksimal, minimal, dan standar deviasi untuk mendiskripsikan variabel penelitian, kompetensi, komitmen organisasi, kualitas review dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas LKPD.

2. Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen

Berdasarkan hasil pengujian validitas terhadap masing-masing butir pertanyaan, tidak semua item pertanyaan adalah valid. Ada beberapa item pertanyaan yang tidak valid, namun secara umum butir pertanyaan tersebut valid. Butir pertanyaan yang valid terbukti dengan r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga pengujian dapat dilanjutkan pada pengujian realibilitas. Untuk butir pertanyaan yang tidak valid terbukti dengan r hitung lebih kecil dari r tabel, sehingga tidak dapat digunakan untuk pengolahan data berikutnya.

Pengujian realibilitas dilakukan menggunakan program SPSS for Windows 16. Hasil uji realibilitas masing-masing kelompok pertanyaan adalah reliable. Terbukti dengan nilai cronbach's alpha lebih besar dari batas nilai alpha. Oleh karena hasil uji semua kelompok pertanyaan adalah reliable, maka instrument penelitian layak digunakan untuk pengolahan data berikutnya.

a. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dalam model regresi perlu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari pengujian normalitas data, multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan melalui uji statistik dengan menggunakan uji normalitas non parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai Kolmogorov-Smirnov Z mendapatkan nilai signifikansi yang lebih dari 0.05. Persamaan yang baik adalah apabila data berdistribusi normal.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan pengujian untuk melihat adanya hubungan antara variabel independen. Penelitian yang mengandung multikolinieritas akan berpengaruh terhadap

hasil penelitian sehingga penelitian tersebut menjadi tidak berfungsi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel bebas (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi asumsi klasik tersebut adalah dengan cara melihat tabel VIFnya. Jika hasil perhitungan VIF (*Variance Inflation Factor*) melebihi angka 10, maka disimpulkan ada indikasi adanya multikolinieritas yang berbahaya.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Uji Gletser melakukan dua tahap dalam mendeteksi adanya heteroskedastisitas. Pertama, melakukan *absolute*. Kedua, melakukan regresi sederhana antara *absolute regression* dan tiap-tiap variabel independent, bila ditemukan nilai t hitung > t tabel diantara hasil regresi tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas pada model.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah suatu analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, kualitas review, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas LKPD. Persamaan umum untuk mengetahui regresi berganda adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Y_1$$

4. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan dua model regresi untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian adalah :

- Jika nilai signifikansi < 5 %, maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
- Jika nilai signifikansi > 5 %, maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

5. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (bebas) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (terikat) dengan melihat nilai signifikansi F. Jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif tidak dapat ditolak atau dengan $\alpha = 5$ persen variabel independen secara statistik mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

6. Koefisien Determinasi

Angka koefisien determinasi menunjukkan presentase tingkat kebenaran prediksi dari model regresi. Nilai koefisien determinasi (R²) menyatakan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model regresi. Sedangkan sisanya (100%-R²) dapat dijelaskan oleh sebab-sebab lain selain variabel independen (Ghozali, 2018). Rumus : $\text{Adjusted } r^2 \times 100 \%$

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kondisi ini terjadi karena kompetensi staf akuntansi juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara

efektif dan efisien. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas.

Hasil ini mendukung penelitian Yunita (2017), membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil ini sejalan dengan penelitian Hari Raditya Nugroho (2016), yang memberikan hasil kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Aditya Sanjaya (2017), membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kondisi ini terjadi karena komitmen organisasional dapat didefinisikan sebagai sebuah kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari organisasi, sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan organisasi, sebuah keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi. Suatu komitmen organisasi menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam organisasi. Komitmen pada organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada organisasi yang mempekerjanya, sehingga kualitas LKPD semakin meningkat.

Hasil ini mendukung penelitian Amirullah et al (2010), membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil ini sejalan dengan penelitian Muhammad Ikhsan (2018), yang memberikan hasil komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Hari Raditya Nugroho (2016), membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Pengaruh Kualitas review Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas review mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kondisi ini terjadi karena Laporan Hasil review yang didalamnya terdapat Pernyataan Telah Di review dari Inspektur sebagai dasar pembuatan Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah yang menyertai Laporan Keuangan. Hasil yang diharapkan dari review berkualitas adalah rekomendasi yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas LKPD.

Hasil ini mendukung penelitian Maulana, dkk (2017), membuktikan bahwa kualitas review berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil ini sejalan dengan penelitian Risdhayanti Nur Sholikah, dkk (2017), yang memberikan hasil kualitas review berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Hari Raditya Nugroho (2016), membuktikan bahwa kualitas review berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

d. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kondisi ini terjadi karena tujuan penerapan Sistem Pengendalian Internal adalah menyajikan data yang dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong pelaksanaan kebijaksanaan yang ada, melindungi harta Pemerintah Daerah, mendorong ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan. Unsur Sistem Pengendalian Internal merupakan dasar untuk penyelenggaraan dan sebagai tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hasil ini mendukung penelitian Maulana, dkk (2017), membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil ini sejalan dengan penelitian Yunita (2015), yang memberikan hasil sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Kesuma, Anwar, Darmansyah (2017), membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin tinggi kompetensi, maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat. Hasil ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,217 dan nilai signifikansi $0,047 < 0,05$.
2. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin tinggi komitmen organisasi, maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat. Hasil ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,220 dan nilai signifikansi $0,026 < 0,05$.
3. Kualitas review berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin tinggi kualitas review, maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat. Hasil ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,390 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.
4. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin tinggi sistem pengendalian intern, maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat. Hasil ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,206 dan nilai signifikansi $0,022 < 0,05$.
5. Secara bersama-sama kompetensi, komitmen organisasi, kualitas review, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin baik kompetensi, komitmen organisasi, kualitas review, dan sistem pengendalian intern, maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat.
6. Variabel kompetensi, komitmen organisasi, kualitas review dan sistem pengendalian intern dapat menjelaskan kualitas laporan keuangan yang diambil auditor pemerintah sebesar 82,30 %. Sisanya sebesar 17,70 %, dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini, seperti integritas, obyektivitas, skeptisisme akuntansi dan lain-lain.

REFERENCES

- Amirullah, Darwanis & Yahya, M. R. 2010. Pengaruh Kompetensi Auditor dan Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Inspektorat Aceh. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol. 3 (2): 130-154.
- Anggraeni, F. S. (2020). Kinerja keuangan rumah sakit syariah: pendekatan Maqashid Syariah Concordance (MSC). *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(2), 104-115.
- Astika Rahmawati, dkk. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*. Volume 20 Nomor 2 Tahun 2018.
- Bahtiar, M. R. (2020). Volatility Forecasts Jakarta Composite Index (JCI) and Index Stock Volatility Sector with Estimated Time Series. *Indonesian Capital Market Review*, 12-27.

-
- Bakhtiar, M. R., & Sunarka, P. S. (2019). Keamanan, Kepercayaan, Harga, Kualitas Pelayanan Sebagai Pemicu Minat Beli Customer Online Shop Elevenia. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(2), 203-218.
- Bakhtiar, M. R., & Sunarka, P. S. (2020). The Factors of Tourist Satisfaction Enhancement in Double-Decker Tour Bus. *JKBM (JURNAL KONSEP BISNIS DAN MANAJEMEN)*, 7(1), 82-93.
- Bakhtiar, M. R., Kartika, E., & Listyawati, I. (2020). Faktor-faktor pengaruh minat nasabah pengguna internet banking Bank Syariah Mandiri. *Al Tijarah*, 6(3), 156-167.
- Desmaria Puji Kesuma, Choirul Anwar, Darmansyah. 2017. Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata. *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika* Volume 1 Nomor 2 Desember 2017.
- Eda, A., Karamoy, H. & Gamaliel, H. 2017. Pengaruh Prosedur Reviu, Kompetensi dan Jangka Waktu Pelaksanaan Terhadap Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Se-Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. Vol. 8 (1): 222-232.
- Hari Raditya Nugroho. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., Donnelly, Jr., J.H. 1985. *Organizations*. 5th Edition. Business Publication, Inc.
- Hullah. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 3 No. 2, Hal 210-218.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cetakan 2. Edisi 1. BPFE. Yogyakarta.
- Ismail, H. A., & Kartika, E. (2019). Peran Kemaritiman Indonesia di Mata Dunia. *Jurnal Sains dan Teknologi Maritim*, 20(1), 83-89.
- Ismail, H. A., Trimiati, E., & Prihati, Y. (2020). Membangun model konseptual faktor sinergitas perilaku konsumen dalam konteks pembelian impulsive secara online. *Al Tijarah*, 6(3), 10-20.
- Kartika, E., Sunarka, P. S., & Bakhtiar, M. R. (2021). Faktor-Faktor Pengendali Keputusan Pembelian di Marketplace Era Pandemi Covid-19. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(2), 377-389.
- Kalbers, Lawrence P., dan Forgy, Timothy J. 1995, Professionalism Its Consequences: A Study of Internal Auditors, *Auditing: A Journal of Practice*. Vol. 14. No. 1 Pg.64-86.
- Kesuma, Indra, Nadirsyah, Darwanis. 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Auditor dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No.1.

-
- Krisnawati. 2012. Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Etika auditor Terhadap Kualitas Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor Pemerintah di Inspektorat Kabupaten dan Kota Sepulau Lombok), *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan* Vol. 8 No. 3 Nop. 2012.
- Kuntadi, Cris. 2009, Seminar dan Diskusi Panel : Peningkatan Kapasitas Auditor Internal Dalam Pelaksanaan reuiu Laporan Keuangan, Jakarta ABFI Isntitute Perbanas.
- Manaf, I. A., Arfan, M., & Darwanis. 2014. Pengaruh Pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*.Vol.3 (4): 23-35.
- Maulana, Aditya. 2017. Determinan Kualitas Reviu dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Economia*, Volume 13, Nomor 2.
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. 2007. The Measurement of Organizational Commitment. *Journal of Vocational Behavior*. Vol 14: 224-247.
- Muhammad Ikhsan. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Medan. Repositori Institusi USU.
- Pinder, Gary. 2000. *Human Resource Mamanjement*. London. Pretice- Hall. Inc. A Daromount Communication Company.
- Purwani, T. (2019). ABID concept in the effect of financial policy on firm value. *HOLISTICA-Journal of Business and Public Administration*, 10(2), 51-68.
- Purwani, T. (2020). Peranan Sikap Mahasiswa Terhadap Gaya Kepemimpinan Direktur Akademi Manajemen Bumi Seballo Bengkayang. *Jurnal Ekonomi Integra*, 9(2), 114-124.
- Purwani, T., & Arvianti, I. (2020). Constructing harmonization of multicultural society. *Social Science Learning Education Journal*, 5(06), 157-170.
- Purwani, T., & Arvianti, I. (2020, December). The Economic Empowerment Model of Multicultural Society. In *The 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020)* (pp. 171-178). Atlantis Press.
- Purwani, T., & Oktavia, O. (2018). Profitabilitas, Leverage, Kebijakan Dividen, Kepemilikan Institusional dan Growth Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 25(1).
- Purwani, T., Arvianti, I., & Karyanti, T. (2020, May). The Model of Harmonization of Multiculturalism Society at Magelang Regency. In *International Conference on the....* Retrieved from <https://www.atlantis-press.com/proceedings/ticash-19/125940636>.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Riduwan dan Surya. 2013. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangli Dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi* Vol. 2 No. 1.
- Risdhayanti Nur Sholikah, dkk. 2017. Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan

Keuangan (Studi pada Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 12 Edisi Khusus April 2016.

- Robbins, SP. 2006. *Perilaku Organisasi- Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. PT. Prenhallindo. Jakarta
- Sanjaya, Aditya. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar). *JOM Fekon* Vol.4 No.1 (Februari) 2017.
- Santoso, A., Kessi, A. M. P., & Anggraeni, F. S. (2020). Hindrance of quality of knowledge sharing due to workplace incivility in Indonesian pharmacies: Mediating role of co-worker and organizational support. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(2), 525-534.
- Sri Lastanti, Hexana, 2005, Tinjauan terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Atas Skandal Keuangan. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* Vol. 5 No. 1 April 2005. Hal. 85-97.
- Sugiyono. 2012. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Alfa Beta. Bandung.
- Trimiyati, K. E. (2018). ANALISA FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS NELAYAN DI KAWASAN TAMBAK LOROK. *JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI MARITIM*, 17(2).
- Umar, Husein. 2007. *Metode Penelitian*. Gramedia. Jakarta.
- Widhi, Nugroho, Saputro dan Setyawati, Erma. 2015. Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Empiris Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah). *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 19, Nomor 1.
- Widyarini, K. 2015. Pengaruh Prosedur Reviu, Latar Belakang Pendidikan, Tekanan Waktu, dan Anggaran Dana Reviu pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Daerah di Provinsi Bali). Tesis. Universitas Udayana Denpasar.
- Widaningsih, R. A., Sukristanta, S., & Kasno, K. (2020). Tantangan Bagi Organisasi dalam Mempertahankan Kinerja Pegawai Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Al Tijarah*, 6(3), 193-198.
- Widayati, Y. T., Prihati, Y., & Widjaja, S. (2021). ANALISIS DAN KOMPARASI ALGORITMA NAÏVE BAYES DAN C4. 5 UNTUK KLASIFIKASI LOYALITAS PELANGGAN MNC PLAY KOTA SEMARANG. *Jurnal Transformatika*, 18(2), 161-172.
- Widayati, Y. T., Prihati, Y., Widjaja, S., Prakoso, S. A., & Notobudojo, A. R. (2021). Implementasi Twitter Bootstrap dalam Pengembangan Aplikasi Web E-Commerce (Studi Kasus Toko Putra Reban Kendal). *Jurnal Transformatika*, 19(1), 26-37.
- Yunita, T Asri. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf akuntansi terhadap Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Pada SKPD Kota Dumai). *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.